

ABSTRAK

Berdasarkan temuan data di lapangan mengenai kegiatan pemilihan umum, khususnya petugas PPS yang bekerja di wilayah kecamatan Mulyorejo Surabaya. Bahwasanya masih ditemukan PPS yang bekerja tanpa batasan waktu, upah yang masih jauh dari kelayakan, tidak diatur nya waktu istirahat kerja, terlambat dalam menerima upah dan tidak adanya keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Dari beberapa permasalahan itu penelitian ini bertujuan untuk melihat kedudukan hukum dan perlindungan hukum mengenai petugas PPS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian nya petugas PPS yang ada berada di wilayah kecamatan mulyorejo yang bekerja pada waktu pemilihan pileg dan pilpres. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan telaah Pustaka. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan PPS bisa menggunakan UU yang mengatur PKWT dalam UU ketenagakerjaan dan undang undang cipta kerja. Kemudian mengenai perlindungan hukum PPS, kesimpulan yang didapatkan adalah belum ditemukannya bentuk perlindungan hukum secara tertulis mengenai PPS, yang ada hanya penyediaan perlindungan fasilitas berupa ruang kerja dari PPS.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perlindungan Hukum, PPS Surabaya

ABSTRACT

Based on the factual data collected on general election activities, particularly by Voting Committees (PPS) working in the Sub-district of Mulyorejo, Surabaya, there are still Voting Committees (PPS) who work with no time limits, inadequate wages, unregulated break time, postponed wages, and no safety and health at work. Based on these findings, this study aimed to look at the legal standing and legal protection of the Voting Committees (PPS). This study used an empirical juridical method and a qualitative descriptive research design. The Voting Committees (PPS) who worked during the parliamentary and presidential elections in the Mulyorejo sub-district became research subjects, and the data were collected by interviews and literature review. Data analysis was carried out using qualitative descriptive: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. As the findings of this study, the position of Voting Committees (PPS) can utilize Labor Law that regulates Specific Time Employment Agreement (PKWT) in Manpower Law and Job Creation Law. The conclusion reached in regards to the legal protection of Voting Committees (PPS) was that no written form of legal protection for Voting Committees (PPS) had been discovered, and there was only the provision of facility protection in the form of a workspace for Voting Committees (PPS).

Keywords: Legal Standing, Legal protection, Surabaya Voting Committees (PPS)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah.....	7
1.3. Tujuan	7
1.4. Kegunaan.....	8
1.5. Keaslian	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Metode Penelitian.....	12
1.7. Teknik Pengumpulan Data	14
1.8. Metode Analisa Data	15
BAB II KAJIAN UMUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM HUKUM	
KETENAGAKERJAAN.....	16
2.1. Panitia Pemungutan Suara	16
2.1.1. Pengertian Panitia Pemungutan Suara.....	17
2.1.2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS	18
2.2. Perjanjian Kerja dan Para Pihak Dalam Hubungan Kerja	22
2.2.1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	22
2.2.2. Para Pihak Dalam Hubungan Kerja	30
2.3. Perlindungan Hukum Dalam Hubungan Kerja	32
BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PANITIA	
PEMUNGUTAN SUARA.....	39
3.1. Kedudukan Hukum Panitia Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	48
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Panitia pemungutan Suara di Surabaya	56
BAB IV PENUTUP	60

3.1. Kesimpulan.....	60
3.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	12
-------------------------------------	----